

## BAB IV PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



### A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

#### A.1. Urusan Perdagangan

##### 1. Dinas Perdagangan Kab. Bantul

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - 1) Kegiatan Pelayanan Kemetrollogian Daerah
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - 1) Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/Asosiasi/ Pengusaha
  - 2) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - 1) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk;
  - 2) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang
  - 3) Kegiatan Peningkatan pelayanan Perdagangan
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - 1) Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - 2) Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- e. Program Pemberdayaan Pedagang
  - 1) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar
- f. Program Penataan Pasar Rakyat
  - 1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat
  - 2) Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI
  - 3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat

#### 4) Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

### A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 1. Dinas Perdagangan Kab. Bantul

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### a) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Maksud dan tujuan program ini adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi untuk meningkatkan jumlah wajib tera yang melakukan tera/tera ulang . Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1,628,020,760 dan terealisasi sebesar Rp 1,574,654,223 atau 9,8 %.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

##### 1. Kegiatan Pelayanan Kemetrolagian Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang berkompeten, Pembangunan Gedung yang mendukung pelayanan.

Alokasi Anggaran : Rp 1.628.020.760,-

Realisasi Anggaran : Rp 1.574.654.223,- (96,72%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah UTTP yang Ditera/Tera Ulang 60.000 Unit

- Jumlah Pelaksanaan Koordinasi 25 Kali
- Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrollogian 240 Orang
- Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrollogian 3 Kali
- Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Pasar 21 Kali
- Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Puskesmas 54 Kali
- Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Dilokasi UTTP Berada 100 Kali
- Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang 1 Kegiatan

**b) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor**

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan nilai ekspor. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.510.315.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.502.871.750 atau 99,51%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

1. Kegiatan Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/Asosiasi/Pengusaha

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan nilai ekspor dari para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bantul.

Alokasi Anggaran : Rp 229.300.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 226.207.000,- (98,65%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/Elektronik 50 Kali
- Jumlah Publikasi Melalui Sosial Media 1 Dokumen

- Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan 60 Orang
- Jumlah Bahan Publikasi Audio Visual 1 Publikasi

## 2. Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Ekspor merupakan tolok ukur pasar produk dalam negeri yang diminati publik. Dengan meningkatnya kualitas produk daerah (dalam negeri) dan meningkatkan SDM pelaku usaha, agar mampu bersaing dalam pangsa pasar dalam dan luar negeri. Sangat dibutuhkan adanya pelatihan dan promosi untuk memperkenalkan produk daerah di pasaran dunia

Alokasi Anggaran : Rp. 1.281.015.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 1.276.664.750,- (99,66%)

Tingkat Capaian :

- Pameran yang Diikuti 7 Kali
- Jumlah Peserta Pelatihan 120 Orang
- Jumlah Dokumen Penataan Eksportir 1 Dokumen

### c) **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

Maksud dan tujuan program ini adalah mengendalikan kenaikan harga terutama harga bahan pokok. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 148.783.000 dan terealisasi sebesar Rp 148.668.500 atau 99,92%.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

1. Kegiatan Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Alokasi Anggaran : Rp 69.842.500,-

Realisasi Anggaran : Rp 69.758.000,- (99,88%)

Tingkat Capaian :

- Terlaksananya Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok 12 Dokumen
- Terlaksananya Operasi Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis 2 Kali

2. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sistem Resi Gudang

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui tunda jual hasil panen yang direaksikan di gudang SRG

Alokasi Anggaran : Rp 35.770.500,-

Realisasi Anggaran : Rp 35.770.500,- (100,00 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Peserta Sosialisasi SRG 75 Orang
- Jumlah Peserta Temu Usaha 30 Orang

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk menjamin keamanan produk yang diperdagangkan di masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen

Alokasi Anggaran : Rp 43.170.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 43.140.000,- (99,93%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Kegiatan Perdagangan yang Dipantau dan Diawasi 9 Jenis

**d) Program Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan**

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah kawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.584.759.500 dan terealisasi sebesar Rp 1.468.767.301 atau 92,68%.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

1. Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lebih mengkhususkan pada prioritas pembangunan tempat untuk berjualan para Pedagang Kaki Lima.

Alokasi Anggaran : Rp 832.975.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 747.257.000,- (89,71 %)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Lokasi Sentra Kuliner 1 Kawasan
- Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kecamatan Srandakan 1 Dokumen
- Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kecamatan Pleret 1 Dokumen
- Jumlah Penyusunan DED PKL di Kabupaten Bantul 1 Dokumen

2. Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melengkapi bangunan atau tambahan sarana pendukung fasilitas menjadi lebih lengkap sehingga dapat menjadi daya tarik pembeli

Alokasi Anggaran : Rp 751.784.500,-

Realisasi Anggaran : Rp 721.510.300,59 (95,97%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Kawasan PKL yang Terbangun 1 Kawasan
- Jumlah Tenda untuk PKL 18 Unit
- Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL 80 Orang
- Jumlah Pemetaan PKL 1 Dokumen
- Jumlah Lokasi Terpadu PKL 1 Kawasan

#### **e) Program Pemberdayaan Pedagang**

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan omzet pedagang pasar melalui promosi pasar dan pendampingan APPSI. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.158.119.671 dan terealisasi sebesar Rp 1.142.285.200 atau 98,63%.

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

1. Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan SDM Para Pedagang Rakyat khususnya dalam hal pengelolaan APPSI agar lebih berdaya dalam turut serta mengelola pasar rakyat bersama sama dengan Pengellola pasar dari Dinas Perdagangan. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat melatih kemandirian APPSI dalam mengatasi permasalahan permasalahan kecil yagada di Pasar Rakyat.

Alokasi Anggaran : Rp 1.158.119.671,-  
Realisasi Anggaran : Rp 1.142.285.200,- (98,63%)  
Tingkat Capaian :

- Jumlah Peserta Pendampingan APPSI 210 Orang
- Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar (10 Kali) 200 Orang
- Terlaksananya Lomba Pasar Bersih 1 Kali
- Terlaksananya Grebeg Pasar 1 Kali
- Terlaksananya Peresmian Pasar 1 Kali
- Penayangan Advetorial dan Videotron 1 Tahun
- Jumlah Baliho Terpasang 6 Unit
- Jumlah Kajian Omzet / Pendapatan Pedagang 1 Dokumen
- Jumlah Pemeliharaan Baliho 9 Unit

**f) Program Penataan Pasar Rakyat**

Maksud dan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah kondisi pasar dalam kondisi baik. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 8.477.466.161 dan terealisasi sebesar Rp 8.283.482.174 atau 98%.

Program Penataan Pasar Rakyat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penataan dan pemeliharaan pasar rakyat di kabupaten Bantul.

Alokasi Anggaran : Rp 4.792.158.535,-

Realisasi Anggaran : Rp 4.720.245.074,- (98,50%)

Tingkat Capaian :



- Tersusunnya DED Pasar Rakyat 2 Dokumen
- Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Rakyat 25 Pasar
- Tersusunnya DELH Pasar Bantul 1 Dokumen
- Terlaksananya Revitalisasi PSG 1 Lokasi

2. Kegiatan Pengembangan Pasar Rakyat ber SNI

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi Kualitas Pasar Rakyat Imogiri

Alokasi Anggaran : Rp 40.429.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 31.750.600,- (78,53%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Pendampingan Pengembangan Pasar Rakyat Ber-SNI (Pasar Imogiri) 1 Pasar
- Terlaksananya Uji Lab 1 Kali
- Terlaksananya Surveylan SNI 1 Kali

3. Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan penataan dan pemeliharaan pasar rakyat di kabupaten Bantul

Alokasi Anggaran : Rp 3.400.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp 3.293.315.000,- (96,86%)

Tingkat Capaian :

- Terlaksananya Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Pasar Rakyat 2 Unit

4. Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi peningkatan pendapatan pasar.

Alokasi Anggaran : Rp 244.878.626,-

Realisasi Anggaran : Rp 238.171.500,- (97,26%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat 1 Dokumen
- Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat 1 Kali
- Jumlah Penguatan SDM Pasar 1 Kali
- Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana Bergulir dan Pengelolaan MCK 38 Kali



### **A.1.2 Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Perdagangan**

---

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Pada prinsipnya, pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Bantul yang kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1  
Sasaran dan Program Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.430.450.000
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	369.000.000
		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1.700.875.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.500.325.000</b>
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Program Pemberdayaan Pedagang	1.098.125.000
		Program Penataan Pasar Rakyat	9.159.665.629
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.257.790.629</b>
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.724.005.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.724.005.000</b>

Tabel 2  
Keterkaitan Kebijakan Kabupaten Bantul dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

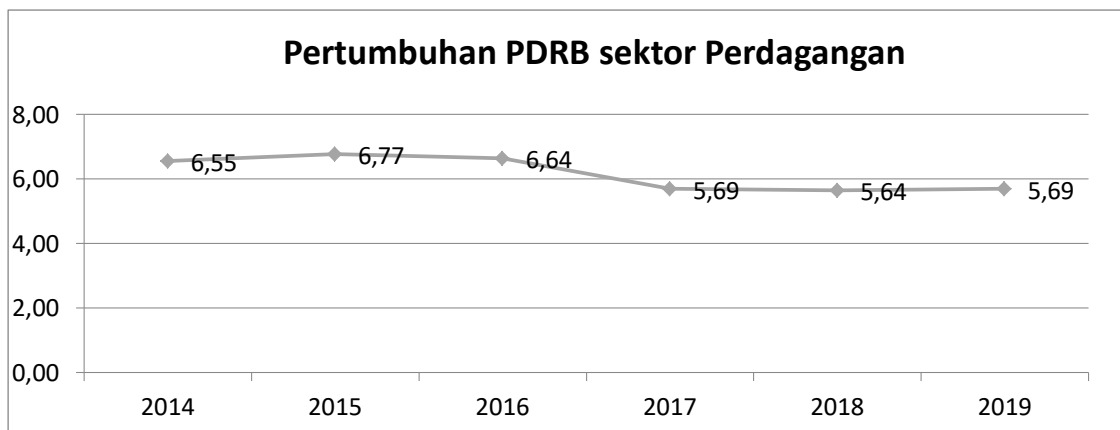
Visi Kabupaten: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"								
NO.	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	<b>MISI 3:</b> Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah pasar tipe A
Terwujudnya kualitas produk perdagangan			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan			
			Meningkatnya pertumbuhan ekspor		Pertumbuhan Nilai Ekspor			

meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan. Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB

sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah sebesar 5,33%, realisasi sebesar 5,69%, tercapai 106,75%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,64% maka capaian tahun 2019 naik sebesar 0,05

Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan



Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2019, diolah

rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)



Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Perekonomian Bantul di sektor perdagangan mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sekitar 6,08 persen secara riil selama periode 2014-2019. Meskipun tidak seoptimis tahun 2015

yang mencapai 6,77 persen. Namun demikian sub sektor perdagangan di Bantul

menunjukkan kondisi yang semakin membaik dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif dan stabil.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

#### **a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**

Maksud dan tujuan program ini adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi untuk meningkatkan jumlah wajib tera yang melakukan tera/tera ulang. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 1.682.020.760 dan terealisasi sebesar Rp 1.574.654.223 atau 96,79%.



*Gambar 3.6 Gedung Metrologi*

UTTP yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada tahun 2019 adalah sebanyak 21.314 unit dari target sebanyak 216.381 unit.

Pentingnya mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertib ukur baik dalam hal kepentingan umum, usaha, menyerahkan

atau menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir dalam

perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang berkompeten, Kendaraan operasional yang mendukung mobilitas dan pelayanan prima Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat

standar kemetrolgian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2020:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrolgian kelas M2
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber DAK TA 2021
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

a) Kegiatan Pelayanan Kemetrolgian Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi Pemerintah Daerah, dan perlunya didukung dengan peralatan standar yang memadai, SDM yang berkompeten, Pembangunan Gedung yang mendukung pelayanan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.628.020.760-, terealisasi sebesar Rp 1.574.654.223,- atau sebesar 96,72%.

**b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**

Maksud dan tujuan program ini adalah mengendalikan kenaikan harga terutama harga bahan pokok. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 148.783.000 dan terealisasi sebesar Rp 148.668.500 atau 99,92%.

Pada tahun 2019 angka deviasi harga komoditas strategis adalah sebesar 2,71 persen, yang artinya perbedaan harga komoditas tahun 2019 naik sebesar 2,71 persen dibanding harga pada tahun 2018. Deviasi

harga ini dibawah 10 persen sehingga masuk dalam kategori inflasi ringan (normal).

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain:

### **1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 69.842.500-, terealisasi sebesar Rp 69.758.000- atau sebesar 99,88%.

Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk menjamin ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kegiatan mengambil lokasi di Pasar rakyat dan distributor bahan pokok di Kabupaten Bantul. Yang telah dilakukan selama tahun 2019 :

#### *a. Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya*



*Pemantauan harga di Pasar Imogiri*

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau

seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe, dll. Sedangkan untuk barang penting yang dipantau ketersediaan dan harganya meliputi bahan bangunan seperti semen, triplek dan baja di



toko bangunan. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau Barang Kebutuhan Pokok yang di bentuk oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan beranggotakan petugas pasar dan pedagang pasar (APPSI)

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha. Menjelang Hari Raya Idul Firti 1440 H kemarin pemantauan dilaksanakan di pasar Niten dan Distributor Daging Sumilir dan Distributor Bawang Merah Kretek. Pemantauan TPID menjelang Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dilaksanakan di pasar Piyungan dan Distributor Beras Makmur Jaya Piyungan.

*b. Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Pasar Murah barang kebutuhan pokok*

*Operasi Pasar Murni (OPM)  
Bersama Bulog Divre DIY ke Desa*



Kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bank Indonesia, Bulog Divre DIY dan

distributor barang kebutuhan pokok lainnya yang berlokasi di daerah rawan pangan dan rawak kemiskinan. Komoditas yang dijual meliputi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Lokasi OPM di desa Dlingo, desa Guwosari Pajangan, dan di kecamatan Imogiri yang meliputi desa Wukirsari, Karangtengah, Sriharjo, dan Girirejo.

*Pasar Murah menjelang Hari  
Raya Idul Fitri 1440 H*



Pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan dukungan distributor barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, hari Natal dan Tahun Baru.

c. *Operasi pasar (op) dan pasar murah komoditas lainnya*

Merupakan kegiatan fasilitasi dari dinas perindustrian dan perdagangan DIY dan bantuan CSR dari Bank Indonesia menghadapi hari raya Idul Fitri 1440 H. Komoditas yang dijual meliputi minyak goreng, beras, gula pasir, telur ayam, terigu, dan daging ayam. Lokasi di Guwosari dan Sendangsari Triwidadi Pajangan, Trimurti Srandakan, dan Imogiri (desa Wukirsari, Kebonagung, Selopamioro).

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan kendala seperti:

- Belum adanya sistem informasi harga barang kebutuhan pokok sehingga informasi belum bisa diketahui masyarakat luas
- belum adanya sasaran penerima dan lokasinya OPM
- kurang intensifnya aparat desa untuk menginformasikan ke masyarakat
- belum adanya subsidi dari APBD untuk menjual barang kebutuhan pokok di bawah HET bagi daerah rawan kemiskinan.

## 2. Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang



*Monev dari Bappebti ke Gudang SRG Niten Kab. Bantul*

Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang dibangun Bappebti dengan tujuan untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan nasional, memberikan alternatif pembiayaan bagi para petani dan UMKM di daerah untuk menyimpan barang kebutuhan pokok di gudang untuk mendapatkan harga terbaik. Gudang SRG Niten di Kabupaten Bantul dibangun pada tahun 2009 seluas 600 m<sup>2</sup> dengan kapasitas penyimpanan 1.400 ton.

Gudang tersebut juga dilengkapi dengan penunjang usaha bisnis berupa Dryer/ pengering dengan kapasitas 8 ton, Rice Milling Unit (RMU/ Mesin Penggilingan Gabah) dengan kapasitas 2 ton/jam, alat transportasi berupa truk dan kendaraan roda tiga. Pengelola gudang SRG sampai saat ini masih dipegang oleh KUD Tani Harjo Pandak, meskipun dalam pengelolaannya masih belum optimal. Tujuan SRG ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui tunda jual hasil panen yang diresikan di gudang SRG.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan gudang SRG Niten di Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- Luas lahan pertanian yang dimiliki petani di Kabupaten Bantul umumnya relatif sempit sehingga hasil panen petani juga sedikit
- Hasil panen petani di konsumsi sendiri dan petani telah memiliki lumbung untuk menyimpan hasil panen sendiri
- Prinsip petani Bantul ada uang ada barang, sehingga lebih suka kalau langsung dijual ke pedagang/ tengkulak
- Proses peresian dinilai membutuhkan waktu lama dan syarat yang rumit ( dari mulai uji mutu sampai penerbitan resi yang melibatkan perbankan)
- Kurangnya permodalan pengelola gudang sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan gudang SRG

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan gudang SRG Niten telah dilaksanakan :

*a. Sosialisasi Pengelolaan Gudang SRG*

Hasil dari Sosialisasi SRG:

- Konsep pola kemitraan petani dengan SRG yang ditawarkan dapat berupa pemberian pinjaman sarana produksi pertanian (bibit/ benih, pupuk) dan asuransi pertanian. Setelah diproduksi oleh petani, diharapkan hasil panen bisa dijual ke SRG dan disimpan di gudang melalui mekanisme resi gudang;
- Intervensi perubahan yang ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat melalui pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM); budaya kerja (strategi pelayanan, kerjasama tim, dll); dan tujuan organisasi (visi, misi, nilai, strategi);

- Pengelolaan keuangan petani sangat penting untuk dilakukan dari mulai persiapan tanam sampai pasca panen untuk menilai seberapa besar keuntungan petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

b. *Temu Usaha*

Hasil Temu Usaha dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan gudang SRG perlu didukung :

- Stanby Buyer (Pasar lelang, Buyer SRG sendiri)
- Lembaga Penyangga yang dapat diperankan perum Bulog dengan mendukung, membeli, dan mendistribusikan barang dari gudang dalam kerangka Stock Pangan Nasional
- Perusahaan pengguna komoditi/ pelaku usaha seperti Perpadi
- Pedagang sebagai Off Taker dan Pasar Komoditi
- Kesepahaman bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, sektor swasta, serta pelaku usaha untuk membangun SRG yang berhasil guna



*Temu Usaha SRG*

c. *Monitoring dan Evaluasi*



Monitoring ke gudang SRG telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaannya. Namun demikian, untuk tahun 2019 pengelolaan gudang mengalami kendala dari segi permodalan pengelola SRG (KUD Tani Harjo Pandak) sehingga baru bisa terbit resi 1 senilai Rp.

*Bukti penerbitan Resi Gudang pada Desember 2019*

42.500.000,- dengan kapasitas 5 ton. Monitoring juga telah dilakukan oleh Bappebti ke gudang SRG dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan gudang SRG di Kabupaten Bantul. Untuk evaluasi pelaksanaan pengelolaan gudang SRG juga telah dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait yang masuk dalam anggota Tim Optimalisasi SRG

### 3. Pelayanan Pengamanan Perdagangan

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang antara lain bertujuan untuk : a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; e) meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen perlu dilakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan perdagangan.



*Pemantauan distribusi dan HET gas LPG 3 kg di pangkalan*

Ruang lingkup pengawasan perdagangan meliputi : pengawasan terhadap barang yang dilarang, diatur dan diawasi peredarannya; pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi; pengawasan terhadap penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting; serta pengawasan terhadap ketersediaan/ stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pelaksanaan pengawasan perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Pengawasan Kegiatan Perdagangan, yang di dalamnya mengatur : a) obyek pengawasan; b) parameter pengawasan; c) mekanisme pengawasan. Sedangkan untuk pelaksana pengawasan kegiatan perdagangan dapat dilakukan oleh : a) Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN); b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG); c) PNS yang telah diusulkan Dirjen PKTN Kemendag. Untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perdagangan dibentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Terpadu dengan SK dari Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bantul yang beranggotakan dari Polres, Kodim, Satpol PP serta instansi teknis terkait.

Dalam rangka peningkatan pengawasan perdagangan, Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya antara lain:

*a. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan HET gas LPG 3 kg*

Di Kabupaten Bantul terdapat 12 agen dan 1.036 pangkalan LPG 3 kg yang bertugas sebagai penyalur kebutuhan LPG bagi masyarakat. Lingkup pemantauan dan pengawasan yang dilakukan adalah penyaluran/ distribusi dan harga serta penggunaan LPG 3 kg apakah sudah tepat sasaran. Dari hasil pemantauan dan pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kg di pangkalan didapatkan bahwa secara umum distribusinya cukup lancar dan harganya bervariasi dari Rp. 15.500,- sampai Rp. 18.000,-/ tabung, hanya untuk daerah yang medannya sulit seperti Dlingo distribusinya masih kurang merata dan harga cenderung lebih mahal sampai Rp. 20.000,-/tabung. Sedangkan untuk ketersediaan/ stok LPG 3 kg cukup aman, meskipun sempat terjadi kelangkaan menjelang hari besar keagamaan namun sudah dapat teratasi dengan adanya penambahan kuota fakultatif dari Pertamina.

Pemantauan dan pengawasan penggunaan LPG 3 kg juga dilakukan di beberapa rumah makan dan peternakan ayam. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa untuk penggunaan LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga miskin dan industri mikro, sedangkan untuk usaha komersial tidak diperkenankan. Dari hasil pemantauan dan

pengawasan masih ditemukan beberapa rumah makan dan peternak ayam yang menggunakan LPG 3 kg usahanya. Oleh Pertamina saat itu juga dilakukan penukaran tabung dari 2 tabung LPG 3 Kg ditukar 1 tabung LPG 5,5 kg serta diberi surat pernyataan dari Dinas Perdagangan untuk tidak memakai lagi tabung gas LPG 3 kg.

*b. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan HET pupuk bersubsidi*

Sesuai dengan Permendag No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, Dinas Perdagangan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi, mutu pupuk dan HET di tingkat distributor dan pengecer/ kios resmi. Di Kabupaten Bantul terdapat 6 distributor dan kurang lebih 60 kios pengecer resmi pupuk bersubsidi. Jenis pupuk bersubsidi yang dipantau meliputi Urea, SP-36, ZA, Phonska dan Petroganik. Dari hasil pantauan di beberapa distributor dan kios pengecer resmi diperoleh bahwa secara umum distribusi, harga dan mutu pupuk bersubsidi sudah sesuai aturan.

*c. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan HET barang kebutuhan pokok*



*Pembinaan dan pemantauan bersama Balai POM Yogyakarta ke pasar rakyat*

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dilakukan pemantauan dan pengawasan baik pada saat kondisi normal maupun menjelang hari besar keagamaan nasional. Pemantauan dilakukan di beberapa distributor/ pelaku usaha barang kebutuhan pokok (bapok) seperti beras, telur, daging, bawang merah, cabai, gula pasir, minyak goreng & terigu maupun di pasar rakyat. Secara umum dari hasil pemantauan untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok cukup aman, harga dibawah HET dan distribusi lancar.



*d. Peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan*

Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk olahan pangan dilakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di beberapa pasar rakyat di kabupaten bantul. Pemantauan dilaksanakan oleh tim terpadu bersama dengan Balai POM Yogyakarta. Sasaran yang dipantau adalah produk olahan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin/ pengawet, rhodamin b/ pewarna merah, boraks/ pengenyal.

*e. Peredaran gula kristal rafinasi*



*Pemakaian GKR untuk industri pembuatan gula merah dan gula batu*

Sesuai Permendag Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi disebutkan bahwa Gula Kristal Rafinasi (GKR)

merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi industri makanan dan minuman yang tidak boleh diperdagangkan secara eceran. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada industri pengguna dan pelaku usaha IKM/UKM yang menggunakan GKR sebagai bahan baku proses produksi, melakukan sosialisasi kebijakan perdagangan GKR sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap penjualan GKR yang tidak sesuai peruntukan.

Pembinaan, pemantauan dan pengawasan perdagangan GKR telah dilakukan di 8 pasar rakyat di Kabupaten Bantul bersama Disperindag DIY. Dari hasil pemantauan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Masih ditemukan adanya perdagangan GKR di beberapa pasar rakyat di Kabupaten Bantul, baik yang dijual murni GKR maupun yang dicampur dengan gula konsumsi. Hal ini disebabkan karena masih banyak pedagang yang belum mengetahui secara detail GKR, baik bentuk maupun ciri-cirinya.
- Rata-rata pedagang juga belum memahami adanya aturan terkait perdagangan GKR



*f. Bimbingan Teknis Pemakaian Tes Kit Bahan Berbahaya*

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi dan bekal kepada pengelola pasar dan APPSI terkait penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dan cara pengujiannya sehingga diharapkan dari pengelola pasar rakyat bisa melakukan pengawasan secara mandiri.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan pengamanan perdagangan antara lain:

- Tidak adanya pelaksana pengawasan seperti PPNS-DAG dan PPTN di Dinas Perdagangan sehingga terkendala dalam melakukan penindakan jika ditemukan adanya pelanggaran.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2020 terkait pengendalian harga barang pokok dan bahan penting lainnya antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
2. Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
3. Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
4. Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;



Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu.

Pada tahun 2019 ini, dilaksanakan pembangunan gedung khusus PKL di Telaga Desa Baturetno, Kec. Banguntapan. Selain itu, pada tahun 2018 telah berhasil dibangun Pusat Kuliner Taman Angkrusari di Dusun Tegalsari, Desa Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul. Namun demikian, bangunan yang sudah jadi belum sepenuhnya memadai karena minimnya anggaran. Sehingga pada tahun 2019, Pemerintah Kab. Bantul melalui Dinas Perdagangan kembali

menganggarkan pembangunan atau lebih tepatnya penambahan fasilitas yang sebelumnya belum terpenuhi.

Penataan PKL dapat berjalan dengan lancar tak lepas karena adanya sinergi dan kerjasama antara Dinas Perdagangan dengan jajaran pengurus DPD APKLI maupun DPC APKLI. Diharapkan untuk kedepannya dengan adanya tempat kuliner ini memberikan dampak positif untuk Pedagang kaki lima dari segi peningkatan ekonomi khususnya. Selain itu, kegiatan atau aktivitas ekonomi yang sudah tercipta dapat berkelanjutan pasca kegiatan ini berlangsung.

Kendala yang terjadi pada koordinasi dengan para PKL yang sebagian besar menolak untuk dipindah karena takut kehilangan pelanggan sehingga nantinya tidak ramai lagi. Penjelasan yang diberikan harus persuasif supaya lebih mengena.



*Proses pembangunan tempat kuliner Banguntapan*

*Sasaran 2.*  
meningkatnya kualitas  
pasar rakyat

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah;

meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Pasar Imogiri pada tahun 2017 lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Standarisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015. Sertifikat ini berlaku sampai tahun 2019. Pasar Imogiri telah melakukan surveyan untuk mempertahankan sertifikat SNI ini. Perbaikan dan perubahan ke arah yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu dilakukan.



Kabupaten Bantul patut berbangga menyusul keberhasilan Pasar Imogiri dalam mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015. Seritfkasi ini diperoleh dari Kementerian Perdagangan

(Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). Dengan demikian Pasar Imogiri di Bantul ini menjadi satu-satunya pasar rakyat ber-SNI di wilayah DIY.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

a. **Penataan Pasar Rakyat**

Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta

memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul.

Sampai dengan akhir tahun 2019 di Kabupaten Bantul terdapat 20 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Data Kondisi Pasar Tahun 2019 Di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Kondisi Pasar	Ket
1	Pasar Bantul	Kurang Baik	Atap, lantai, selasar, hydrant
2	Pasar Niten	Kurang Baik	Atap, lantai, ketersediaan air bersih
3	Pasar Imogiri	Baik	-
4	Pasar Piyungan	kurang baik	Atap, saluran air di los ikan dan daging belum ada, ketersediaan air bersih, hydrant
5	Pasar Sorobayan	kurang baik	Atap dan tempat sampah
6	Pasar Mangiran	rusak	Atap, lantai, drainase, konstruksi bangunan memerlukan rehab total
7	Pasar Gumulan	rusak	Sebagian besar los dalam kondisi rusak dan tidak layak, pagar belum ada
8	Pasar Pijenan	Kurang Baik	Ketersediaan air bersih
9	Pasar Sungapan	Baik	Kamar mandi dan TPS
10	Pasar Semampir	Baik	Septiktank
11	Pasar Celep	Baik	Musholla
12	Pasar Jodog	kurang baik	Atap, sirkulasi cahaya dan udara, lantai
13	Pasar Angruksari	Baik	Masih terdapat beberapa tampias air hujan
14	Pasar Turi	kurang baik	Banyak bangunan non permanen yang tidak layak
15	Pasar Pundong	kurang baik	Masih banyak los yang kondisinya tidak layak
16	Pasar Gatak	kurang baik	Atap dan lantai
17	Pasar Barongan	kurang baik	Atap, lantai, pagar
18	Pasar Dlingo	kurang baik	Akses jalan masuk, los hewan belum ada atap
19	Pasar Jejeran	Baik	Masih terdapat tampias dan kurang pagar pasar
20	Pasar Pleret	kurang baik	Diperlukan perbaikan atap dan talang

21	Pasar Ngipik	Baik	-
22	Pasar Panasas	Baik	Perlu rehabilitasi drainase
23	Pasar Kliithikan Niten	kurang baik	Rehabilitasi kantor pengelola pasar
24	Pasar Hewan Imogiri	Baik	Kantor dan mck
25	Pasar Hewan Pandak	Baik	-
26	Pasar Janten	Baik	Perlu rehabilitasi sebagian atap yang bocor
27	Pasar Jragan	Baik	-
28	Pasar Koripan	Baik	Tempat sampah sementara dan atap
29	Pasar Grogol	Baik	Penyempurnaan tempat sampah
30	Pasar Bendosari	Baik	-
31	Pasar Sangkeh	Kurang baik	Kantor, pagar, mck, lanscape
32	Pasar Seni Gabusan	Baik	-

*Sumber Data: Dinas Perdagangan, 2019*

Beberapa pembangunan/rehabilitasi pasar yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 :



*Pembangunan mushola pasar Dlinao  
Rehab pasar Piyungan*



*Calon lokasi untuk rehab pasar Turi*







*Rehab pasar Panasan, los ikan pasar Imogiri, paving block pasar Bantul*

Pada tahun 2019 juga dilaksanakan revitalisasi Pasar Seni Gabusan. Pasar ini dibangun pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada awal mula tujuan dibangunnya pasar ini adalah sebagai sarana dan prasarana bagi para pengrajin dalam upaya memfasilitasi tempat untuk memasarkan hasil kerajinannya. Dengan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi terkait, diharapkan PSG dapat menjadi salah satu *destinasi*



wisata dari para *tourist* yang hendak membeli cinderamata atau oleh-oleh khas dari Kab. Bantul



**b. Pemberdayaan Pedagang**

Pada tahun 2019 terjadi kenaikan omzet pedagang sebesar 0,47% dibanding omzet tahun 2018.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program ini antara lain:

*a. Pelatihan Pedagang Pasar Rakyat*

Dari pelatihan ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan SDM Para Pedagang Rakyat khususnya dalam hal pengelolaan APPSI

- Melatih kemandirian APPSI dalam mengelola Pasar Rakyat
- Memberikan semangat kepada APPSI agar lebih berdaya di Pasar Rakyat
- Pengurus APPSI dapat menyusun program kerja dan Anggaran Belanja
- Pengurus APPSI dapat menyusun/merencanakan pendapatan APPSI
- Dapat menjadi sarana yang efektif untuk ajang diskusi antar pedagang.
- Pengenalan inovasi baru untuk berdagang.



#### *b. Grebeg Pasar*

Grebeg Pasar merupakan suatu acara untuk memperkenalkan produk unggulan masing masing Pasar Kabupaten se-Kabupaten Bantul dalam satu wadah Bazar Produk unggulan Pasar,

sehingga pasar dapat mempertahankan eksistensisebagai salah satu ya serta menjadi upaya/ langkah mengajak masyarakat belanja hemat di pasar rakyat

#### *c. Lomba Pasar Bersih dan Sehat*



Menciptakan Pasar Rakyat yang Sehat, Bersih, Aman dan Nyaman yang didukung perilaku Hidup Sehat oleh Pedagang Pasar Rakyat merupakan usaha yang harus dilakukan.

#### *Penilaian Lomba Pasar Bersih dan Sehat*

Dari lomba pasar sehat ini diharapkan:

- Menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga nantinya akan menjadi budaya pada tiap pasar.
- Memperkenalkan peran serta APPSI dalam pengelolaan Pasar Rakyat

- Turut serta menjaga sarana dan prasarana yang ada di masing masing pasar.

Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan pelaksanaan program ini adalah:

1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar
2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas.merupakan hasil terus menerus dan berkelanjutan dari promosi pasar
3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dangangnya melalui media online
5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI



Gambar 3.8 Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Tahun 2014-2019

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.000.000,00 dan telah memberikan kontribusi pendapatan jasa sebesar Rp141.200.000,- Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul

yang berjumlah 13.655 orang, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

## Kinerja Lain-lain

### 3.3.1 Sertifikat ISO 9001:2015

Salah satu kegiatan di Dinas Perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah kegiatan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Tahun 2019 adalah tahun kedua Dinas Perdagangan mendapatkan sertifikat ISO. Dasar dalam penerapan ISO 9001:2015 di Pemerintahan yaitu Pelayanan Publik sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik. ISO ini penting bagi pelayan publik karena ini merupakan pengakuan dari lembaga yang mensyaratkan variabel-variabel sistem manajemen yang harus dipenuhi OPD;

ISO 9001: 2015 adalah standar dokumen (Standard/ Persyaratan) yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya. Ada beberapa dokumen standar yang berbeda dalam ISO 9000 , tapi hanya ISO 9001-2015 yang bisa disertifikasi. ISO 9001: 2015 adalah standar terbaru dari Sistem Manajemen Mutu ini, dan “2015” adalah tahun revisi terbaru dari sistem Manajemen Mutu itu.

Untuk proses ISO ini ada 2 tahapan. Tahapan I adalah persiapan, dimana dilakukan beberapa kali pendampingan untuk pelatihan pemahaman/awareness,

pembentukan Tim ISO, pendampingan audit internal, komplain, dan resiko, pembuatan dan pengesahan dokumen, serta persiapan audit sertifikasi. Dalam hal pendampingan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dibantu oleh Pendamping ISO dari CV. Gama Solution (tim Qomarudin, M.Kes);

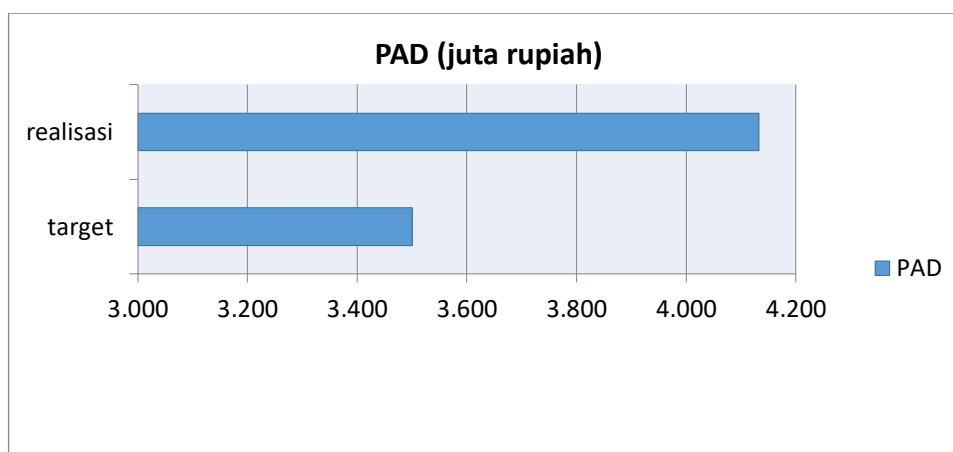
Hal-hal yang telah dipersiapkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait ISO 9001:2015 antara lain adalah beberapa dokumen



ISO ( Standar Operasional Prosedur ) antara lain Buku Manual Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Sasaran Mutu; laporan tim survey/komplain, laporan tim resiko, dan laporan tim audit internal; Setelah tahapan persiapan selesai, dilakukan proses tahapan II yaitu proses audit oleh lembaga sertifikasi. Untuk audit, Auditor untuk proses sertifikasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan oleh Badan Sertifikasi Nasional NQA Indonesia. Pada tanggal 31 Oktober 2019 akhirnya Dinas Perdagangan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 .

### 3.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perdagangan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, MCK pasar, tera/tera ulang, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari target PAD sebesar Rp 3.500.300.000,00 mampu tercapai sebesar Rp 4.132.957.810,- atau terealisasi sebesar 118,07%. PAD terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar berupa sewa kios/los.



Gambar 3.10 Target dan Realisasi PAD Tahun 2019

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	3.380.549.050	3.690.777.725	109,18%
2016	2.700.000.000	2.893.491.150	107.17%
2017	3.423.000.000	3.732.640.519	109,05%



2018	3.274.494.000	3.873.985.940	118,31%
2019	3.500.300.000	4.132.957.810	118,07%

### 3.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Tabel 3.24 Nilai rata-rata unsur pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,418
U2	Prosedur	3,327
U3	Waktu pelayanan	3,389
U4	Biaya/tarif	<b>3,734</b>
U5	Produk layanan	3,564
U6	Kompetensi pelaksana	3,394
U7	Perilaku pelaksana	3,163
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,383
U9	Sarana dan prasarana	3,597

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa 9 unsur pelayanan memperoleh nilai persepsi di atas 3 dengan nilai tertinggi pada unsur Biaya/tarif. Ketiga unsur dengan nilai tertinggi adalah:

- Biaya/tarif
- Sarana dan prasarana
- Produk layanan

Hal tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi informasi terkait biaya/tarif pelayanan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sudah diketahui oleh masyarakat. Informasi yang sampai di masyarakat ini harus tetap dipertahankan.

Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah pada unsur perilaku pelaksana dalam pelayanan. menggambarkan bahwa pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk perilaku dalam pelayanan masih perlu dievaluasi dan diperbaiki

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan Tahun 2019 adalah **86,02**

*Tabel 3.25 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan*

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 -64,99	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	76,61 -88,30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar **86,02** dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul kategori “ **BAIK**”.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No.	Permasalahan	Solusi
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya gejolak harga cabai karena kurangnya pasokan</li> <li>• Gejolak harga bawang merah (produksi Bantul) kalah bersaing dengan kualitas kompetitor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pasokan dengan kemitraan dengan pelaku usaha.</li> <li>• Fasilitasi dengan stakeholder/shareholder dalam memberikan nilai tambah produk cabai merah</li> <li>• Revitalisasi Pasar Lelang Bawang Merah di Parangtritis, Kretek</li> </ul>
2	Fungsi gudang dengan mekanisme resi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pengelola gudang SRG</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan gudang SRG</li> </ul>
3	Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Sibapok) belum bisa dilaksanakan oleh Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraan dengan kominfo dalam penyediaan jaringan internet</li> <li>• Peningkatan kapasitas admin sibapok untuk 5 pasar sampel (Pasar Bantul, Niten, Piyungan, Imogiri, Pijenan)</li> <li>• Monev kegiatan sibapok di 5 pasar sampel</li> </ul>
4	Penataan dan pemanfaatan PSG belum optimal	Revitalisasi PSG : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sarpras (panggung hiburan, public area, industri pariwisata, relokasi PKL) → kemitraan/program kolaboratif</li> <li>• Pengelolaan pedagang</li> <li>• Peningkatan kapasitas pengelolaan PSG (aspek product, harga product, aspek promosi, aspek tempat)</li> </ul>
5	Omzet pedagang pasar tidak mengalami peningkatan secara signifikan karena kurangnya daya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regulasi perubahan jam operasi pasar</li> <li>• promosi pasar antara lain melalui undian berhadiah dan promo/diskon secara berkala</li> <li>• mendorong pedagang pasar untuk melakukan inovasi teknik penjualan</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empat puluh satu persen (13 pasar) dalam kategori kurang baik</li> <li>• Enam persen (2 pasar) dalam kategori rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab sedang untuk 13 pasar (Bantul, Niten, Piyungan, Sorobayan, Pijenan, Jodog, Gatak, Barongan, Pleret Klithikan Niten dan Sangkeh)</li> <li>• Rehab berat untuk Pasar Mangiran dan Pasar Gumulan</li> </ul>
7	Tiga puluh delapan persen (32 pasar) Penguasaan kepemilikan tanah yang digunakan untuk pasar rakyat dan kawasan PKL belum clear and clean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penguasaan kepemilikan tanah kas desa dan Sultan Ground untuk pasar rakyat dan kawasan PKL.</li> <li>• Sewa tanah kas desa untuk pasar rakyat</li> </ul>
8	Penataan dan pemanfaatan los pasar bantul Lt.2 belum optimal	Revitalisasi Lt.2 Pasar Bantul



No.	Permasalahan	Solusi
9	Penyelenggaraan kemetrolagian yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Updating data wajib tera</li><li>• Sosialisasi</li><li>• Pengawasan kemetrolagian</li><li>• Peningkatan kapasitas untuk SDM</li><li>• Penyempurnaan gedung metrologi</li><li>• Pengadaan alat standar kemetrolagian</li></ul>